

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap kewenangan yang bersifat sentralistik selama 20 tahun masa orde baru di pemerintahan, lahir kebijakan otonomi daerah untuk menjawab tuntutan dan berbagai permasalahan yang ada pada masa orde baru. Lahirnya otonomi daerah selaras dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah yang menjadi pedoman penting untuk memajukan kehidupan demokrasi.

Menurut Mansyur (2012:2) Dalam UU nomor 22 tahun 1999 mengubah pola pembangunan dari sentralistik menjadi desentralistik, dengan memberikan kekuasaan otonom secara luas kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Sehingga, dalam pelaksanaan otonomi daerah memberikan dampak perubahan di Indonesia, perubahan tersebut terjadi dalam sistem pemerintahan yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang.

Adyatma dan Oktavian (2015:190), menjelaskan adanya otonomi daerah ikut serta dalam menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal, sehingga pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di pusat dan akan berdampak untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengoptimalan potensi pendapatan daerah dan akan memberikan porsi belanja yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif di daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah supaya mengelola dan

mengembangkan potensi daerah nya masing-masing untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:11) menyatakan otonomi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dilakukan dengan memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah desentralisasi.

Desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan melakukan kegiatan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah. Adanya desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan perkembangan daerah, sesuai dengan motivasi pemerintah untuk mengembangkan daerah mereka berdasarkan potensi khusus daerah nya masing-masing.

Menurut Windhu Putra (2018:215) dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip

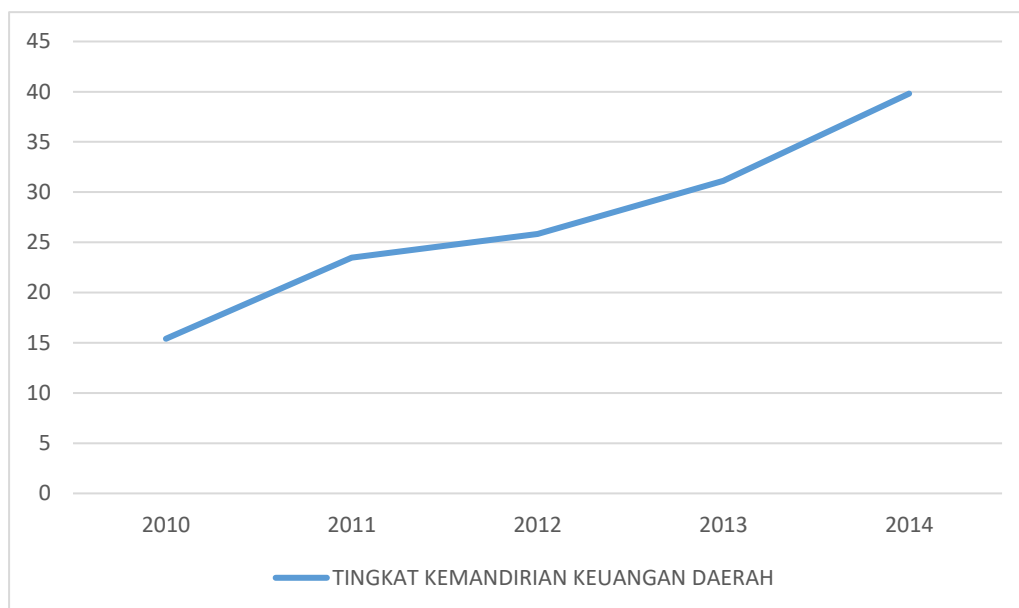
yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Sama seperti halnya dengan adanya dana transfer dari pusat kepada daerah dalam urusan otonomi, terdapat konsekuensi yang dapat timbul dari kegiatan tersebut.

Menurut Bird and Vaillancourt dalam Bambang S (2012:186), menyatakan mengenai urgensi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*);
2. hadirnya otonomi daerah dapat dapat pula didekati dari perspektif politik;
3. dari perspektif manajemen pemerintah negara modern adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan urgensi otonomi daerah diatas kewenangan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan keleluasaan dan kemandirian setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Apabila pemerintahan dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri.

Menurut Halim (2012:1) Kondisi Indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah karena indikasi bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Selain itu, indikasi dari pihak luar pun menuntut daya saing pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Daya saing pemerintah daerah diharapkan dapat tercapai dengan pelaksanaan kemandirian pemerintah daerah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2016

Gambar 1. 1

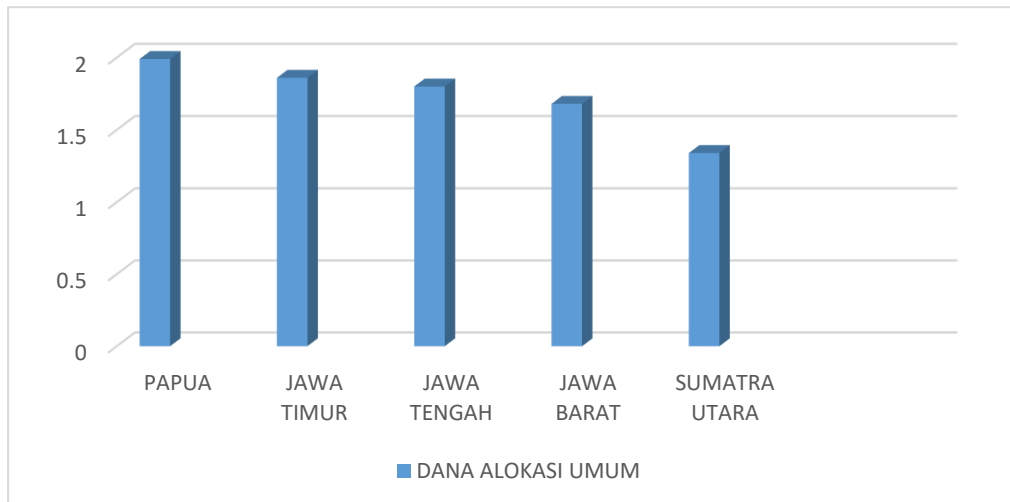
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2014

Berdasarkan gambar 1.1 tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014 mengalami kenaikan. Namun, dalam kenaikan tersebut masih dalam rata-rata 27% sehingga tingkat kemandirian keuangan daerahnya masuk dalam kategori pola hubungan pemerintah konsultatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah tersebut masih rendah dan masih membutuhkan campur tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan keuangan daerahnya.

Implementasi dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Sehingga hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti. Masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Permasalahan dalam keuangan menjadi sangat penting karena dapat menghambat dalam pembangunan dan pemerintahan daerah. Pada realitanya kontribusi dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak proporsional. Pemerintah pusat membiayai daerah dengan jumlah yang besar dan tidak selaras dengan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan belanja daerah.

Fenomena yang terjadi adalah ketika pendapatan asli daerah tidak mampu menutup pengeluaran daerah, maka dibandingkan dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah cenderung mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan berdampak kurang baik terhadap kemandirian daerah karena mencerminkan pemerintah daerah belum mampu untuk membiayai dan mengurus urusan pemerintahannya itu sendiri. Ketergantungan fiskal terhadap pusat justru lebih parah terjadi pada daerah kabupaten/kota.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

Gambar 1. 2
Provinsi Penerima Jatah Dana Alokasi Umum Terbesar di Indonesia 2014
(Dalam Triliun Rupiah)

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu yang masuk dalam peringkat lima besar dalam menerima dana transfer. Lima besar yang mendapatkan transfer adalah Provinsi Papua, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Sumatra Utara.

Fenomena yang timbul dalam dana transfer terletak pada perbedaan pemahaman fungsinya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan dana transfer untuk pemerataan keuangan antar daerah. Sedangkan, pemerintah merespon dana transfer sebagai pemberian dana untuk mencukupi kebutuhan daerahnya. Dalam perbedaan ini yang menyebabkan adanya respon belanja yang lebih banyak dari dana transfer dari pada pendapatan asli daerahnya itu sendiri. Hal ini sering disebut dengan *flypaper effect*.

Menurut Yoga (2019), kenaikan DAU dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyesuaian belanja pemerintah daerah akan lebih tinggi daripada

kenaikan DAU itu sendiri. Jika kita melihat realisasi belanja pemerintah daerah, kualitas belanja daerah masih kurang bagus. Rata-rata 45% anggarannya habis untuk membayar pegawai. Bahkan ada yang lebih dari itu. Sehingga untuk setiap kebutuhan pembangunan penting lainnya pemerintah daerah menggantungkan pembiayaan APBD pada transfer dari pusat. Solusi yang mungkin dapat mengatasi hal ini adalah dengan menetapkan batas atas belanja pegawai dan batas minimum belanja modal.

Ndadari, dkk (2008) mengatakan ketika transfer DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh lebih besar atau tetap. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya *flypaper effect* dan daerah menjadi tidak lebih mandiri karena bergantung pada pemerintah pusat.

Tabel 1. 1

Proporsi DAU Terhadap Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2014

Tahun	DAU	Belanja Daerah	Proporsi
2010	Rp 13.773.791.000.000	Rp 26.701.159.000.000	51,58%
2011	Rp 19.473.659.449.520	Rp 40.488.284.971.558	48,09%
2012	Rp 24.304.466.550.000	Rp 46.229.208.411.800	52,57%
2013	Rp 27.124.439.757.500	Rp 55.079.352.982.557	49,24%
2014	Rp 29.565.459.297.900	Rp 62.050.029.986.260	27,64%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Data Diolah)

Dari tabel diatas Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh yang cukup besar dalam belanja daerah sesuai dengan proporsi. Meskipun setiap tahun nilai proporsi berfluktuasi tetapi hal tersebut masih mengindikasikan terjadinya *flypaper effect*. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar dibanding penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull dalam Listorini, 2012)

Kemandirian keuangan tidak terlepas dari Pendapatan Asli Daerah. Provinsi Jawa Barat sebagai daerah otonom harus bisa memanfaatkan potensi dan sumber daya untuk meningkatkan PAD daerah Jawa Barat. Berdasarkan berita pada website Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pada 15 Agustus 2017 menyatakan:

“dari empat komponen PAD, harus diakui pajak daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu mencapai 92,28% terhadap PAD. Ini setara dengan 56,79% dari total pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk tiga komponen PAD lainnya yaitu retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,43%, 1,98% dan 5,40% terhadap PAD”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan kontribusi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal tersebut mengindikasikan pajak daerah harus dikelola dengan baik untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan faktor yang sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembangunan daerah serta penetapan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai sumber penghasilan bagi daerah, sehingga setiap potensi yang dapat menghasilkan bagi daerah harus dapat di gali semaksimal mungkin dan di kelola dengan sebaik-baiknya. Tentunya tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lia dan Dematria, 2020)

Tabel 1. 2
Kontribusi Masing-Masing Pos dalam Pendapatan Asli Daerah Kota
Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2010-2014

Tahun	Jenis Penerimaan			
	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan (Rp)	Lain-Lain PAD yang sah (Rp)
2010	1.122.587.000.000	616.952.000.000	193.988.000.000	971.945.000.000
2011	3.291.675.835.041	794.118.486.748	203.482.965.766	1.597.853.656.014
2012	4.715.328.850.913	856.900.422.004	218.048.132.695	2.147.522.273.403
2013	6.339.729.834.099	1.069.741.322.507	262.869.449.996	2.528.971.386.258
2014	7.790.145.005.884	1.270.529.081.743	296.194.261.472	4.721.872.757.890

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Data Diolah)

Melihat data di atas, maka pengembangan potensi pajak dan retribusi di Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih terbuka lebar terlihat dari penerimaan pajak dan retribusi selama lima tahun yaitu tahun 2010-2014 selalu mengalami peningkatan. Selain itu, penerimaan pajak daerah selalu menempati kontribusi tertinggi dibandingkan dengan pos penerimaan lainnya. Sehingga akan sangat tepat untuk menilai bagaimana efektivitas pajak daerah yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah. Pemerintah perlu untuk memaksimalkan potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan

dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran

Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu jalan pemerintah daerah untuk peningkatan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah erat kaitannya dengan Pendapatan Daerah, Pengeluaran Daerah sampai dengan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah salah satunya dapat berupa Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah. Berdasarkan data diatas yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai Kontribusi Masing-Masing Pos dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2010-2014, Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam PAD, sehingga akan sangat tepat untuk meneliti efektivitas pajak daerah dikarenakan peluang nya yang cukup besar.

Efektivitas Pajak Daerah akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, dengan kata lain dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari efektivitas pajak daerah akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan kemampuan daerah dikatakan mandiri dalam memenuhi kebutuhannya dengan mengandalkan sumber pendapatan asli daerahnya itu sendiri. Maka, terdapat hubungan antaran efektivitas pajak daerah dengan kemandirian keuangan daerah.

Selain itu, sumber Pendapatan Daerah berasal dari Dana Transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana transfer tersebut merupakan

bentuk pemerataan keuangan daerah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya dana transfer dari pemerintah pusat direspon pemerintah daerah untuk belanja daerah yang lebih besar dari pada belanja daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah nya itu sendiri atau dinamakan *flypaper effect*. Hal tersebut didukung berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai Proporsi DAU Terhadap Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2014 memperlihatkan respon Belanja Daerah menggunakan DAU berada pada nilai rata-rata 46%. Dengan kata lain, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pusat masih cukup besar.

Fenomena *flypaper effect* mengindikasikan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal mengindikasikan kemandirian keuangan daerah belum terlaksana cukup baik. Maka, terdapat hubungan antara terjadinya *flypaper effect* dengan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh *flypaper effect* dan efektivitas pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, adapun penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Syahriar Abdullah dan Listia Riani (2020) dengan judul “*Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan” pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan

terhadap Belanja Daerah dan terjadi *flypaper effect* yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan daerah.

2. Ika Kartika dan Leny Suzan (2015) dengan judul “*Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja” studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2008-2012. Hasil penelitian tersebut Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja dibandingkan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja. Oleh karena itu, telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah di Provinsi Banten.
3. Suyanto (2010) dengan judul “*Flypaper Effect Theory* Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dana desentralisasi membuat daerah otonom semakin tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluarannya. Kebijakan dana desentralisasi mendorong timbulnya *flypaper effect* sehingga peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer dari pemerintah pusat telah mendorong peningkatan pengeluaran daerah otonom secara lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pada kapasitas fiskal daerah.
4. Bambang Agus Pramuka (2010) dengan judul “*Flypaper Effect* Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa”. Hasil penelitian menunjukkan *flypaper effect* tidak ditemukan, yang mengisyaratkan bahwa pemerintah

setempat tidak mengandalkan hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber anggaran mereka.

5. Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono (2009) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect*” pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. Hasil penelitian penunjukan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Jawa Tengah.
6. Ahmad Burhanuddin (2012) dengan judul “Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena *Flypaper Effect*”. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *flypaper effect*. Sedangkan, investasi pemerintah dan pembayaran utang pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *flypaper effect*.
7. Ahmad Solikin (2016) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Indonesia” Studi Tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, terjadi *flypaper effect* pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2012-2014.

8. Haryo Kuncoro (2007) dengan judul “Fenomena *Flypaper Effect* Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia”. Hasil penelitian menemukan terdapat peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalan Pendapatan Asli Daerah dan mengindikasikan sikap overaktif pemerintah daerah terhadap arti pentingnya transfer. Terdapat ketergantungan pemerintah daerah pada transfer dari pusat akan semakin membesar.
9. Fitri Amalia (2015) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten”. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara Simultan dan Parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan tidak terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2013.
10. Hani Sri Mulyani dan Dadang Sudirno (2020) dengan judul “Analisis Kemandirian Pembangunan Daerah Kabupaten dan Kota Ciayumajakuning”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat fenomena *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota Ciayumajakuning, artinya daerah tersebut belum mampu membiayai pembangunannya sendiri dan masih tergantung pada pemerintah pusat.
11. Devy S. Octaviana (2014), dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah” yang dilakukan pada DPKD Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah sangat efektif, ditunjukkan oleh hasil pertumbuhan

pajak daerah dari tahun 2008-2012 bertumbuh dengan rata-rata 13,08% per tahun dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 117,51% per tahun. Sedangkan rata-rata efisiensi pajak daerah sebesar 0,076% per tahun.

12. Lia Juhariah L dan Dematria Pringgabayu (2020) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan variabel Pajak Daerah dan variabel Retribusi Daerah baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten XYZ.
13. Indriani Luisa Lohonauman (2019) dengan judul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Sitaro” Menunjukkan Hasil analisis efektivitas dapat diketahui bahwa selama tahun pengamatan 2011-2013, penerimaan pajak daerah sangat efektif terhadap PAD di Kabupaten Sitaro. Rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 14,3%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 116,33%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat efektif.
14. Irsandy Octovido, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu” studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2009 memiliki efektivitas yang terendah (69,30%) dan tahun 2010 memiliki efektivitas yang tertinggi (136,67%) serta kontribusi tahun 2009 memiliki

kontribusi terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%).

15. Fadly Nggilu, Harijanti Sabijono dan Victoria Tirayoh (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo”. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian keuangan Daerah. Variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
16. Aditya Ramadhan Sriparni dan Maria M. Ratna Sari (2015) dengan judul “Analisis Pajak dan Retribusi Daerah Pada Tingkat Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan pajak daerah merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah yang mencapai rata-rata 72% setiap tahunnya. Tingkat efektivitas yang sangat efektif dan rasio kemandirian yang sangat baik.
17. Sunarto dan Y Sunyoto (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi,

Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

18. Rico Putra dan Surya Hidayat (2016) dengan judul “Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah masih rendah, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara rasio-rasio kemandirian daerah dengan pertumbuhan ekonomi.
19. Febby Randria Ramadhani (2016) dengan judul “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah” di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan Tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada 1,59% dengan kategori rendah sekali. Rasio efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan Tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada kecenderungan 92% dengan kategori efektif. *Trend* kemandirian keuangan daerah menunjukkan *trend* positif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. *Trend* efektivitas keuangan daerah menunjukkan *trend* positif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020.
20. Mutiah (2019) dengan judul “*The Effect of Regional Financial Independence, Regional Financial Efficiency and Effectiveness of Regional Original Income on Capital Expenditure*” Study in Provincial Level Regional Government in Indonesia 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran modal, sedangkan efisiensi keuangan daerah tidak

mempengaruhi pengeluaran modal dan efektivitas pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi pengeluaran modal.

21. Afrizal Tahar & Maulida Zakhiya (2011) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Hasil penelitian PAD yang besar akan menyebabkan kemandirian daerah juga semakin besar. Nilai standardised coefficient beta variabel DAU adalah -0.168 dengan nilai sig. $0.024 < \alpha (0.05)$, sehingga dapat disimpulkan DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah. Hal ini berarti semakin besar transfer dana yang diberikan kepada daerah maka kemandirian daerah akan menurun.
22. Muhammad Hasan Basri (2014) dengan judul “Apakah *Flypaper Effect* Terjadi Di Aceh? Studi Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian *flypaper effect* terjadi di Aceh sehingga kemandirian daerah dalam otonomi daerah belum berjalan di Aceh
23. Randy Primahadi dan Rahmat Kurniawan (2021) dengan judul “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman”. Hasil penelitian efektivitas pajak daerah Kota Pariaman adalah dengan kriteria sangat efektif, karena efektivitas pajak daerah dari tahun 2014 sampai 2018 berada diatas 100% semua. Itu artinya pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan dan semua potensi keuangan daerah dari pajak daerah telah dapat dicapai bahkan melampaui target. Hal tersebut mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Tabel 1. 3
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Syahriar Abdullah dan Listia Riani 2020 <i>Flypaper Effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan” pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat	• <i>Flypaper Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Belanja Daerah • Kinerja Keuangan Daerah 	Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah dan terjadi <i>flypaper effect</i> yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan daerah.	Jurnal Widya Ganecwara Volume 10 No.4 2020 FEB UTP Surakarta ISSN 2723-7125
2	Ika Kartika dan Leny Suzan 2015 <i>Flypaper Effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja” studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2008-2012	• <i>Flypaper Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Belanja Daerah 	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja dibandingkan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja. Oleh karena itu, telah terjadi <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah di Provinsi Banten.	Jurnal Akuntansi, FEB, Universitas Telkom Vol.1 No.2 April 2015 ISSN : 2355-9357
3	Suyanto 2010 <i>Flypaper Effect Thoery</i> Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal	• <i>Flypaper Effect</i>	Penelitian sekarang meneliti pengaruh <i>Flypaper Effect</i> terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Menunjukkan bahwa kebijakan dana desentralisasi membuat daerah otonom semakin tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluarannya. Kebijakan dana	Jurnal Ekonomi Pembangunan Volme 11, Nomor 1, Juni 2010:69-92 Universitas Dr. Soetomo Surabaya

				desentralisasi mendorong timbulnya <i>flypaper effect</i> sehingga peningkatkan dana desentralisasi yang ditransfer dari pemerintah pusat telah mendorong peningkatan pengeluaran daerah otonom secara lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pada kapasitas fiskal daerah.	
4	Bambang Agus Pramuka 2010 <i>Flypaper Effect</i> Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa	• <i>Flypaper Effect</i>	Penelitian sekarang meneliti pengaruh <i>Flypaper Effect</i> terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Flypaper effect</i> tidak ditemukan, yang mengisyaratkan bahwa pemerintah setempat tidak mengandalkan hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber anggaran mereka.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 11, Nomor 1, Juni 2010, Halaman 1-12 Universitas Jenderal Soedirman
5	Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono 2009 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008	• <i>Flypaper Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Daerah 	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah Jawa Tengah.	Jurnal Tema Telaah Manajemen, Vol.6 Edisi 1, Maret 2009, Hal 23-50 ISSN 1693-9727
6	Ahmad Burhanuddin 2012 Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi	• <i>Flypaper Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai • Investasi Pemerintah • Pembayaran Utang 	Belanja Pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap <i>flypaper effect</i> . Sedangkan,	<i>Accounting Analysis Journal</i> , Universitas Negeri Semarang, 2012 ISSN 2252-6765

	Pemerintah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena <i>Flypaper Effect</i>		Pemerintah Daerah	investasi pemerintah dan pembayaran utang pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>flypaper effect</i> .	
7	Ahmad Solikin 2016 <i>Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Indonesia</i> ” Studi Tahun 2012-2014	• <i>Flypaper Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, terjadi <i>flypaper effect</i> pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2012-2014.	Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 16 No.1, Februari 2016, Halaman 11-25 Universitas Sebelas Maret
8	Haryo Kuncoro 2007 Fenomena <i>Flypaper Effect</i> Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia	• <i>Flypaper Effect</i>	• Kinerja Keuangan Pemerintah	Peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalian Pendapatan Asli Daerah dan mengindikasikan sikap overaktif pemerintah daerah terhadap arti pentingnya transfer. Terdapat ketergantungan pemerintah daerah pada transfer dari pusat akan semakin membesar.	Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanudin, Makasar Juli 2007
9	Fitri Amalia 2015 <i>Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten</i>	• <i>Flypaper Effect</i>	• Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara Simultan dan Parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan tidak	Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 11, Nomor 1, Maret 2015, Halaman 15-25 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

				terjadi <i>flypaper effect</i> pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2013.	
10	Hani Sri Mulyani dan Dadang Sudirno 2020 Analisis Kemandirian Pembangunan Daerah Kabupaten dan Kota Ciayumajakuning	Menganalisis Kemandirian dan <i>Flypaper Effect</i>	Penelitian Sekarang Menelitis Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> dan efektivitas pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.	Terdapat fenomena <i>flypaper effect</i> pada Kabupaten/Kota Ciayumajakuning, artinya daerah tersebut belum mampu membiayai pembangunannya sendiri dan masih tergantung pada pemerintah pusat.	Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Volume 3 No.2, November 2020 Universitas Majalengka E-ISSN 2621-5012 P-ISSN 2655-822X
11	Devy Octaviana 2014 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah	• Efektivitas Pajak Daerah	• Efisiensi Pajak Daerah • Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah di Provinsi Jawa Tengah sudah Efektif dan Efisien. Dengan rata-rata efektivitas per tahun sebesar 117,51% dan rata-rata efisiensi per tahun sebesar 0,076%.	Jurnal FEB, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang ISBN: 9789790643314
12	Lia Juhariah L dan Dematria Pringgabayu 2020 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	• Pajak Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah	• Retribusi Daerah	Variabel Pajak Daerah dan variabel Retribusi Daerah baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten XYZ	<i>Journal of Accounting Taxing and Auditing</i> Vol.1 No.2, Tahun 2020 Politeknik Pajajaran ICB Bandung
13	Indriani Luisa Lohonauman 2019 Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Sitaro	• Efektivitas Pajak Daerah	• Pendapatan Asli Daerah	Menunjukkan Hasil bahwa selama tahun pengamatan 2011-2013, penerimaan pajak daerah sangat efektif terhadap PAD di Kabupaten Sitaro. Rata-rata perkembangan	Jurnal Mahasiswa. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. ISSN :

				penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 14,3%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 116,33%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat efektif.	2303-1174 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 172-180
14	Irsandy Octovido, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah 2014 Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pajak Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi Pajak Daerah • Pendapatan Asli Daerah 	Tahun 2010 memiliki efektivitas terendah (69,30%) dan tahun 2010 memiliki efektivitas yang tertinggi (136,67%) serta kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%).	Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.15 No.1, Oktober 2014 Universitas Brawijaya
15	Fadly Nggilu, Harijanti Sabijono dan Victoria Tirayoh 2016 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Daerah 	Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian keuangan Daerah. Variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Berkala Ilmu Efisiensi Volume 16 No.4, Tahun 2016 Universitas Sam Ratulangi, Manado

16	Aditya Ramadhan Sriparni dan Maria M. Ratna Sari 2016 Analisis Pajak dan Retribusi Daerah Pada Tingkat Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Daerah 	Pajak daerah merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah yang mencapai rata-rata 72% setiap tahunnya. Tingkat efektivitas yang sangat efektif dan rasio kemandirian yang sangat baik.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13 No.2 November 2015 Universitas Udayana, Bali ISSN: 2302-8556
17	Sunarto dan Y Sunyoto 2016 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Daerah • Kemandirian Daerah 	Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Dharma Ekonomi No.43, STIE Dharmaputra Semarang ISSN 0853-5205
18	Rico Putra dan Surya Hidayat 2016 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah masih rendah, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara rasio-rasio kemandirian daerah dengan pertumbuhan	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.3 No.4 Juni 2016 Universitas Jambi ISSN 2338-4603
19	Febby Randria Ramadhani 2016 Analisis Kemandirian dan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Efektivitas Keuangan Daerah 	Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan Tahun 2010-2015 secara rata-rata	Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14 No.1 Universitas Muhammadiyah

	Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015			berada pada 1,59% dengan kategori rendah sekali. Rasio efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan Tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada kecenderungan 92% dengan kategori efektif. Trend kemandirian keuangan daerah menunjukkan trend positif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020.	Malang ISSN 1693-2595
20	Mutiah 2019 <i>The Effect of Regional Financial Independence, Regional Financial Efficiency and Effectiveness of Regional Original Income on Capital Expenditure Study in Provincial Level Regional Government in Indonesia 2013-2017</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pendapatan Asli Daerah • Pengeluaran Modal 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengeluaran modal, sedangkan efisiensi keuangan daerah tidak mempengaruhi pengeluaran modal dan efektivitas pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi pengeluaran modal.	<i>European Journal of Emerging Markets</i> , 9(2) Universitas Negeri Semarang ISSN 2086-3128
21	Afrizal Tahar & Maulida Zakhya 2011 <i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum 	PAD yang besar akan menyebabkan kemandirian daerah juga semakin besar. Nilai standardised coefficient beta variabel DAU adalah -0.168 dengan nilai sig. $0.024 < \alpha (0.05)$, sehingga dapat disimpulkan DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian	Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 1, halaman: 88-99, Januari 2011 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

				daerah. Hal ini berarti semakin besar transfer dana yang diberikan kepada daerah maka kemandirian daerah akan menurun.	
22	Muhammad Hasan Basri 2014 Apakah <i>Flypaper Effect</i> Terjadi Di Aceh? Studi Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flypaper Effect</i> • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Subjek Penelitian yang berbeda 	<i>flypaper effect</i> terjadi di Aceh sehingga kemandirian daerah dalam otonomi daerah belum berjalan di Aceh	QE Journal Vol.03 - No.04 December 2014 – 199 Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
23	Randy Primahadi dan Rahmat Kurniawan (2021) Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pajak Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Subjek Penelitian yang berbeda 	Efektivitas pajak daerah Kota Pariaman adalah dengan kriteria sangat efektif, karena efektivitas pajak daerah dari tahun 2014 sampai 2018 berada diatas 100% semua. Itu artinya pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan dan semua potensi keuangan daerah dari pajak daerah telah dapat dicapai bahkan melampaui target. Hal tersebut mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.	<i>Journal of Economics and Business</i> , 5(1), Maret 2021, 84-93 Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang

Annisa Fiorentina (2021) 173403113

Pengaruh *Flypaper Effect* dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)

Sumber: Jurnal

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai : Pengaruh *Flypaper Effect* dan Efektivitas Pajak Daerah

Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana *Flypaper Effect*, Efektivitas Pajak Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2015-2019.
2. Bagaimana pengaruh *Flypaper Effect* dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat baik secara parsial maupun secara simultan periode Tahun 2015-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Flypaper Effect*, Efektivitas Pajak Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Flypaper Effect* dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat baik secara parsial maupun bersama-sama periode Tahun 2015-2019.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya untuk membahas *flypaper effect*, efektivitas pajak daerah dan kemandirian keuangan daerah.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan penulis serta mengetahui penerapan ilmu akuntansi di bidang sektor publik.
- b. Bagi Lembaga khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, diharapkan menjadi tambahan bahan bacaan, referensi, bahan masukan dan perbandingan di perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pentingnya kemandirian keuangan daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 yang data keuangannya dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Mei 2021. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel di lampiran penelitian.